

## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, telp. (021) 5202387 (Hunting) website: www.ahu. go.id.

## SURAT KETERANGAN NOMOR AHU-01063.AH.10.01.08 TAHUN 2025

## Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Lidya Patricia

Jenis Kelamin : Wanita

Tempat/Tanggal Lahir : Tg Balai Karimun, 27 April 1975

Alamat Tempat Tinggal Indonesia : Windsor Phase I Bl 2/21 Lubuk Baja Batam

Alamat Tempat Tinggal Luar Nagari : Blk 33 Margaret Drive #36-228 Singapore

Alamat Tempat Tinggal Luar Negeri : 140033

Pekerjaan : Karyawan Nomor Paspor Republik Indonesia : E4532464

Tanggal Habis Berlaku Paspor RI : 08 Desember 2033

Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor

Induk Tunggal (NIT)

2171066704750005

Nomor dan Tanggal Akta Perkawinan : 749724 Tanggal 04 Juli 2005 Nomor dan Tanggal Akta Kelahiran : 106 Tanggal 28 Juli 1975

Nomor Surat Keterangan Naturalisasi : ISC2408SF002855

Status Perkawinan : Kawin

Nama Lengkap Suami/Istri

• Nama : Iwan Hendra Leonardus

• Kewarganegaraan : Indonesia

Berdasarkan Surat Permohonan Saudari tanggal 22 Juli 2025 dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Saudari Lidya Patricia dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, Saudari harus melapor kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia atas perolehan menjadi Warga Negara Asing.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Agustus 2025

a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Tata Negara,





Dulyono

NIP. 196808081993031001

Surat Keterangan ini diproses melalui Sistem AHU Kewarganegaraan yang diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan